



---

## Peran Aktor Lokal dalam Pengembangan Usaha UMKM di Kawasan Kambang Iwak Kota Palembang

Imelda Putri Zulkarnain<sup>1</sup>, Anggie Elma Acintya<sup>2</sup>, Keysha Mutia Ranandityas<sup>3</sup>, Nur Rahma Vadila<sup>4</sup>, Nara Zatty<sup>5</sup>, Gea Lestari<sup>6</sup>, Gita Permatasari<sup>7</sup>, Rudy Kurniawan<sup>8</sup>, Ilal Ilham<sup>9</sup>, Kurnia Asni Sari<sup>10</sup>

Universitas Sriwijaya, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi : [imeldaputrizulkarnain@gmail.com](mailto:imeldaputrizulkarnain@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 06 Mei 2026

---

### ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in local economic development, particularly in urban public spaces where economic and social activities intersect. The Kambang Iwak area in Palembang represents a dynamic public space where MSMEs grow through interactions among various local stakeholders. This study aims to analyze the roles of local stakeholders and their interactions in supporting MSME development in the Kambang Iwak area. This research employs a qualitative descriptive approach, using data collection techniques such as field observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected purposively, consisting of MSME actors and supporting stakeholders, including local government and community actors. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, with triangulation techniques to ensure validity. The findings reveal that the MSME ecosystem in Kambang Iwak is a socially constructed system involving ten key stakeholders with complementary roles. Using Talcott Parsons' AGIL framework, the system demonstrates strong adaptation and integration functions, supported by collaborative governance and social capital in the form of trust and networks. However, the latency function, particularly environmental awareness, remains a challenge. Additionally, the study identifies spatial contestation and digital transformation as key issues for future development. In conclusion, MSME development in Kambang Iwak is sustained by dynamic stakeholder collaboration, strong social relations, and adaptive management, although strengthening social values and digital capacity remains necessary.

**Keywords:** MSMEs, stakeholders, social system, collaborative governance, AGIL

### ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi lokal, khususnya di ruang publik perkotaan yang menjadi titik temu antara aktivitas ekonomi dan sosial. Kawasan Kambang Iwak di Kota Palembang merupakan salah satu ruang publik yang berkembang melalui interaksi berbagai stakeholder lokal dalam mendukung aktivitas UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder lokal serta pola interaksi yang terbentuk dalam pengembangan UMKM di kawasan Kambang Iwak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive yang terdiri dari pelaku UMKM

---

*dan stakeholder pendukung seperti pemerintah daerah dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem UMKM di Kambang Iwak merupakan sistem sosial yang melibatkan sepuluh stakeholder dengan peran yang saling melengkapi. Berdasarkan analisis kerangka AGIL Talcott Parsons, sistem ini menunjukkan fungsi adaptasi dan integrasi yang kuat, didukung oleh praktik collaborative governance dan modal sosial berupa kepercayaan dan jaringan. Namun, fungsi terutama terkait kesadaran lingkungan, masih menjadi tantangan. Selain itu, ditemukan adanya kontestasi ruang dan tantangan transformasi digital dalam pengembangan UMKM. Kesimpulannya, pengembangan UMKM di Kambang Iwak ditopang oleh kolaborasi stakeholder yang dinamis dan sistem sosial yang adaptif, meskipun masih memerlukan penguatan nilai sosial dan literasi digital.*

**Kata Kunci:** *UMKM, stakeholder, sistem sosial, collaborative governance, AGIL*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah karena kontribusinya yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan pembangunan perkotaan, UMKM dipandang sebagai sektor yang relatif adaptif dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi agenda penting dalam kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya di tingkat lokal (Analia, 2020; Khouroh et al., 2023).

Dalam konteks perkotaan, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai unit produksi ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat. Aktivitas UMKM sering kali berkelindan dengan relasi sosial, budaya lokal, serta dinamika ruang publik tempat usaha tersebut berkembang. Dengan demikian, pengembangan UMKM tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses ekonomi, melainkan sebagai proses sosial yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, peran, dan sumber daya yang berbeda-beda (Praja, 2024).

Pendekatan pengembangan UMKM berbasis stakeholder semakin banyak digunakan dalam kajian pembangunan ekonomi lokal. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal pelaku usaha, tetapi juga oleh keterlibatan dan dukungan aktor-aktor lain yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan UMKM. Aktor-aktor tersebut meliputi pelaku UMKM sebagai stakeholder utama, serta pemerintah daerah, komunitas masyarakat, akademisi, dan lembaga pendukung sebagai stakeholder pendukung (Adawiyah et al., 2022; Tahwi & Nurhidayati, 2020).

Dalam perspektif sosiologi, stakeholder dipahami sebagai aktor sosial yang tidak hanya membawa kepentingan ekonomi, tetapi juga nilai, norma, serta kekuasaan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan dan arah pengembangan UMKM. Relasi antar stakeholder membentuk pola interaksi yang dapat bersifat kolaboratif, hierarkis, maupun konfliktual. Pola relasi inilah yang

---

pada akhirnya menentukan sejauh mana UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan inklusif (Astriyantika & Cahyo, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktor lokal memiliki posisi strategis dalam pengembangan UMKM karena kedekatannya dengan konteks sosial dan karakter wilayah. Aktor lokal cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan pelaku UMKM, potensi pasar lokal, serta hambatan struktural yang dihadapi usaha kecil. Nafi'ah (2022) menegaskan bahwa peran aktor lokal sangat penting dalam membangun citra, identitas, dan branding UMKM, terutama melalui pendekatan yang berbasis budaya dan karakter lokal. Hal ini juga diperkuat oleh Setyawan et al. (2023) yang menunjukkan bahwa dukungan stakeholder lokal berpengaruh terhadap keberhasilan rebranding dan penerimaan produk UMKM oleh masyarakat.

Selain aspek branding, peran stakeholder juga terlihat dalam pendampingan usaha, penguatan kapasitas kewirausahaan, serta perluasan jejaring pemasaran. Analia (2020) dan Khourouh et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dan komunitas lokal dapat meningkatkan kinerja UMKM melalui fasilitasi pelatihan, akses permodalan, serta pembukaan jaringan pasar. Dalam hal ini, UMKM tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang dibentuk oleh interaksi antar stakeholder.

Pendekatan *collaborative governance* menjadi salah satu kerangka analisis yang relevan untuk memahami dinamika pengembangan UMKM berbasis stakeholder. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antar aktor yang setara dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Adawiyah et al. (2022) menyatakan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh kondisi awal aktor, distribusi peran, serta mekanisme komunikasi yang terbangun. Ketika kolaborasi berjalan secara partisipatif dan inklusif, pengembangan UMKM cenderung menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan (Elani et al., 2025; Wua et al., 2025).

Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, kolaborasi antar stakeholder juga mendorong terciptanya inovasi sosial dan ekonomi. Keterlibatan akademisi dan komunitas, misalnya, dapat berkontribusi dalam transfer pengetahuan, penguatan literasi kewirausahaan, serta pendampingan berbasis kebutuhan pelaku UMKM (Rahmatika et al., 2025). Sementara itu, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan regulator yang menciptakan iklim usaha yang kondusif (Sudaryanto & Sylvana, 2025). Pendekatan pentahelix yang melibatkan berbagai aktor ini terbukti mampu memperkuat daya saing UMKM di tingkat lokal (Nashir et al., 2023).

Kawasan Kambang Iwak di Kota Palembang merupakan salah satu ruang publik kota yang berkembang sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kawasan ini menjadi tempat berinteraksinya berbagai kegiatan, mulai dari rekreasi, olahraga, hingga aktivitas ekonomi informal dan UMKM. Keberadaan UMKM di kawasan Kambang Iwak menunjukkan bagaimana ruang publik dapat berfungsi sebagai arena ekonomi sekaligus arena sosial yang mempertemukan berbagai stakeholder lokal.

Pengembangan UMKM di kawasan Kambang Iwak tidak terlepas dari peran pelaku UMKM sebagai aktor utama, dukungan komunitas masyarakat, serta kebijakan pemerintah kota dalam pengelolaan ruang publik. Interaksi antar stakeholder di kawasan ini membentuk dinamika tersendiri yang memengaruhi keberlanjutan UMKM, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Namun demikian, sejauh ini kajian yang secara khusus menganalisis peran dan relasi antar stakeholder lokal dalam pengembangan UMKM di kawasan Kambang Iwak masih relatif terbatas (Puspita et al., 2024; Praja, 2024).

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek ekonomi atau kebijakan UMKM secara umum, tanpa menggali secara mendalam relasi sosial dan peran aktor lokal di tingkat mikro. Padahal, pemahaman mengenai bagaimana stakeholder berinteraksi, berkolaborasi, dan membangun jejaring sangat penting untuk merumuskan strategi pengembangan UMKM yang berkelanjutan dan berbasis konteks lokal (Raysharie et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder lokal dalam pengembangan usaha UMKM di kawasan Kambang Iwak Kota Palembang. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi aktor-aktor yang terlibat, peran dan kepentingan masing-masing stakeholder, serta pola interaksi dan kolaborasi yang terbentuk dalam proses pengembangan UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian sosiologi ekonomi dan pembangunan lokal, serta menjadi rujukan praktis bagi pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan dan strategi pengembangan UMKM berbasis kolaborasi stakeholder.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran, kepentingan, dan relasi antar stakeholder lokal dalam pengembangan UMKM di kawasan Kambang Iwak Kota Palembang, sebagaimana ditekankan dalam kajian analisis stakeholder dan *collaborative governance* (Adawiyah et al., 2022; Tahwi & Nurhidayati, 2020).

Lokasi penelitian dilakukan di kawasan Kambang Iwak, Kota Palembang, yang merupakan salah satu pusat aktivitas UMKM dan ruang publik kota. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, dengan kriteria informan merupakan stakeholder yang terlibat langsung dalam pengembangan UMKM. Informan meliputi pelaku UMKM sebagai stakeholder utama serta stakeholder pendukung seperti komunitas lokal dan pihak pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas UMKM (Analia, 2020; Nashir et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat aktivitas UMKM dan interaksi antar stakeholder secara langsung. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi terkait peran, kepentingan, bentuk dukungan, dan pola kolaborasi stakeholder dalam pengembangan UMKM.

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto, catatan lapangan, dan dokumen terkait kegiatan UMKM (Khouroh et al., 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada pemetaan stakeholder, hubungan antar aktor, serta bentuk kolaborasi yang terbentuk dalam pengembangan UMKM. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Elani et al., 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi kreatif di kawasan Kambang Iwak (KI) merupakan suatu sistem sosial yang tidak terbentuk secara spontan, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang melibatkan interaksi dinamis antar sepuluh stakeholder lokal. Berdasarkan observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa keberlangsungan UMKM tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh keteraturan sistem sosial yang mengatur relasi, peran, dan fungsi antar aktor dalam ruang publik (Praja, 2024; Analia, 2020).

Dalam perspektif sosiologi, fenomena ini dianalisis menggunakan kerangka AGIL Talcott Parsons, yang menekankan bahwa keberlangsungan sistem sosial bergantung pada empat fungsi utama: *Adaptation (A)*, *Goal Attainment (G)*, *Integration (I)*, dan *Latency (L)*. Selain itu, analisis juga diperkuat dengan pendekatan *collaborative governance* (Ansell & Gash) dan modal sosial (Putnam) untuk melihat dinamika koordinasi dan kepercayaan antar aktor.

### *Tipologi Stakeholder dan Struktur Sosial Kawasan*

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti melakukan pemetaan aktor untuk melihat bagaimana kekuasaan dan tanggung jawab didistribusikan. Hal ini penting karena dalam sosiologi, aktor tidak hanya bergerak sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari struktur yang memiliki kepentingan tertentu.

**Table : 1 Matriks Identifikasi dan Peran 10 Stakeholder Kawasan Kambang Iwak (KI)**

No	Stakeholder	Peran Strategis	Sumber Data
1	Satpol PP	Penegak Ketertiban Ruang Publik	Wawancara
2	Petugas Kebersihan (DLH)	Fasilitator Kebersihan dan Estetika Lingkungan	Wawancara
3	Pelaku UMKM	Aktor Utama Pengerak Ekonomi Kreatif	Wawancara
4	Tukang Parkir	Pengelola Aksebelitas dan Keamanan	Wawancara
5	Satpam	Penjaga Stabilitas dan Keamanan Mikro Kawasan	Wawancara
6	Koordinator Lapak	Mediator ( <i>Bridging</i> ) Antar-Aktor Lapangan	Wawancara

7	Pedagang Kaki Lima	Penggerak Ekonomi Mikro	Wawancara
8	Pengujung Lokal	Basis Pasar Rutin dan Agen Kontrol Sosial	Wawancara
9	Wisatawan	Pendapatan Musiman dan <i>Branding</i>	Wawancara
10	Dishub	Pengatur Konektivitas dan Kelancaran Lalu Lintas	Observasi dan Data Sekunder

### ***Sinergisitas Multisektoral: Analisis Collaborative Governance Ansell & Gash***

Hasil analisis data menjelaskan bahwa relasi di Kambang Iwak mencerminkan praktik *collaborative governance*. Mengacu pada teori Ansell dan Gash, keberhasilan sebuah ruang publik ditentukan oleh dialog tatap muka dan pemahaman bersama. Informan F (Satpol PP), menekankan bahwa “*penertiban dilakukan bukan untuk mengusir, tapi menata agar pedagang tidak menggunakan area track jogging untuk berjualan*”. Secara sosiologis, ini adalah bentuk manajemen ruang agar tidak terjadi anarki spasial.

Pola ini menunjukkan adanya sinergi antara peran regulatif (Satpol PP) dan operasional (DLH). Informan SH (DLH) mengungkapkan bahwa “*koordinasi terjalin sangat kuat, terutama saat sterilisasi area jogging track sebelum fajar*”. Hal ini sejalan dengan temuan Adawiyah et al., (2022) bahwa kondisi awal yang kondusif antar-aktor adalah modal utama keberhasilan program lokal. Sinergi ini memastikan bahwa UMKM memiliki “panggung” yang bersih dan tertib untuk menjajakan produk mereka, yang secara otomatis meningkatkan daya tarik konsumen.

### ***Analisis AGIL dalam Pengembangan UMKM di Kambang Iwak Adaptation (A): Kemampuan Beradaptasi***

Fungsi adaptasi terlihat dari kemampuan stakeholder dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika ruang publik. Pelaku UMKM menunjukkan fleksibilitas dalam menentukan waktu operasional dan strategi penjualan sesuai dengan pola kunjungan. Tukang parkir juga menyesuaikan pola kerja berdasarkan tingkat keramaian.

Dishub berperan dalam menjaga aksesibilitas kawasan, sementara Satpol PP memberikan toleransi ruang ekonomi selama tidak mengganggu fungsi publik. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan penataan ruang kota.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Khourouh et al. (2023) yang menekankan pentingnya kemampuan adaptasi dalam keberlangsungan UMKM, serta Analia (2020) yang menyebutkan bahwa UMKM memiliki karakter fleksibel terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

### ***Goal Attainment (G): Pencapaian Tujuan Bersama***

Fungsi pencapaian tujuan terlihat dari adanya kesamaan orientasi antar stakeholder dalam menciptakan kawasan yang tertib, bersih, dan produktif secara

ekonomi. Penertiban oleh Satpol PP dilakukan dengan pendekatan persuasif, bukan represif, sehingga tetap memberi ruang bagi aktivitas ekonomi.

DLH berperan memastikan kebersihan sebagai daya tarik kawasan. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara kepentingan ekonomi dan regulasi. Temuan ini mendukung penelitian Tahwi & Nurhidayati (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan UMKM dipengaruhi oleh adanya tujuan kolektif. Namun, seperti yang diungkapkan Fahrizi et al. (2026) ketidakseimbangan kekuasaan dapat memicu konflik, meskipun dalam konteks KI hal ini relatif dapat diminimalkan.

### ***Integration (I): Integrasi dan Koordinasi Sosial***

Fungsi integrasi terlihat dari koordinasi yang terbangun secara formal dan informal. Koordinator lapak berperan sebagai mediator antara pedagang dan pemerintah, sementara interaksi sehari-hari menunjukkan hubungan sosial yang harmonis. Kondisi ini mencerminkan praktik *collaborative governance*, di mana dialog dan komunikasi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan kawasan (Ansell & Gash). Hal ini juga diperkuat oleh temuan Adawiyah et al., (2022) mengenai pentingnya koordinasi dalam pengelolaan program local. Sebaliknya, studi Rizki Fahrizi et al., (2026) menunjukkan bahwa lemahnya integrasi dapat memicu konflik, sehingga integrasi menjadi elemen krusial dalam stabilitas sistem.

### ***Latency (L): Pemeliharaan Nilai dan Norma***

Fungsi *latency* terlihat dari adanya norma sosial seperti menjaga kebersihan, menghormati aturan tidak tertulis, dan menjaga hubungan harmonis antar aktor. Pengunjung lokal juga berperan sebagai agen kontrol sosial. Namun, masih terdapat tantangan dalam kesadaran lingkungan, terutama terkait perilaku membuang sampah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi *latency* belum sepenuhnya optimal. Temuan ini sejalan dengan Rahmatika et al., (2025) yang menekankan pentingnya penguatan nilai dan literasi dalam keberlanjutan UMKM.

### ***Modal Sosial dan Collaborative Governance***

Selain kerangka AGIL, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan kawasan juga ditopang oleh modal sosial berupa kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*network*). Koordinator lapak berfungsi sebagai *bridging social capital*, sementara tukang parkir berperan dalam menciptakan rasa aman bagi konsumen. Modal sosial ini menjadi faktor pembeda dibandingkan kawasan lain seperti Benteng Kuto Besak yang mengalami kendala koordinasi (Fahrizi et al., 2026). Dengan adanya kepercayaan dan komunikasi yang kuat, konflik dapat ditekan dan stabilitas kawasan tetap terjaga.

### ***Kontestasi Ruang dan Tantangan Transformasi Digital***

Kawasan Kambang Iwak juga menunjukkan adanya kontestasi antara estetika kota dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Penataan fisik kawasan meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga meningkatkan tekanan terhadap kebersihan

lingkungan (Setyawan et al., 2023). Di sisi lain, tantangan utama UMKM ke depan adalah transformasi digital. Literasi digital menjadi penting untuk meningkatkan daya saing, terutama dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana branding ((Rahmatika et al., 2025).

Secara keseluruhan, sistem sosial di Kambang Iwak telah memenuhi keempat fungsi AGIL. Fungsi adaptasi dan integrasi berjalan cukup kuat, fungsi pencapaian tujuan menunjukkan keselarasan kepentingan, sementara fungsi latency masih memerlukan penguatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada kekuatan sistem sosial, modal sosial, dan kolaborasi antar stakeholder.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa pengembangan UMKM di kawasan Kambang Iwak merupakan hasil dari kolaborasi dinamis antar sepuluh stakeholder lokal yang menjalankan fungsi regulatif, operasional, dan ekonomi secara simultan. Dalam perspektif sosiologi, keberhasilan kawasan ini tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik, tetapi oleh kuatnya sistem sosial yang terbentuk melalui koordinasi, komunikasi, dan kepercayaan antar aktor. Melalui kerangka AGIL, ditemukan bahwa sistem sosial di kawasan ini telah berjalan relatif stabil, meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek pemeliharaan nilai (*latency*), khususnya terkait kesadaran lingkungan. Selain itu, keberadaan modal sosial dan praktik collaborative governance menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan mencegah konflik ruang.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi digital bagi pelaku UMKM, peningkatan kesadaran lingkungan bagi pengunjung, serta keberlanjutan model kolaborasi antar stakeholder. Pemerintah diharapkan dapat mempertahankan pendekatan persuasif dalam penataan ruang publik agar tetap mendukung keberdayaan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan estetika kota. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak digitalisasi, khususnya sistem pembayaran non-tunai, terhadap perubahan pola interaksi sosial dalam ekosistem UMKM.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adawiyah, V. R., Yayuk, A., Rahayu, S., & Indonesia, U. (2022). ANALISIS AKTOR DAN FAKTOR KONDISI AWAL YANG MEMPENGARUHI COLLABORATIVE GOVERNANCE. 8(November), 809–825.
- Adam, A. S., & Sylvana, A. (2025). Dinamika kolaborasi UMKM ekonomi kreatif, pemerintah, dan komunitas di Kota Solo. *Journal of Citizenship*.
- Analia, D. (2020). Peran Stakeholder dalam meningkatkan kinerja usaha mikro kecil di kota Padang, Sumatera Barat. *Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri*.
- Astriyantika, M., & Cahyo, E. D. (2025). Pemetaan Peran dan Kolaborasi Stakeholder dalam Pengelolaan Ekowisata serta Pengembangan Ekonomi Kreatif Sentra Tapis Lampung di Desa Wisata Lugasari , Provinsi Lampung *Mapping the Role and*

- Collaboration of Stakeholders in Ecotourism Management and Creative Economic Development of the Tapis Lampung Center in the Lugusari Tourist Village , Lampung Province.* 9(1), 24–32.
- Elani Khafni Arij, Pribadi Indah Ayu permana, S. C. (2025). *Collaborative Governance dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.* 7(1), 77–95. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6821>
- Fahrizi, Rizki, Awaluddin, Muhammad, alif, Yansyah M, R. (2026). *Manajemen Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Benteng Kuto Besak Palembang :* 2917, 5255–5263.
- Khourah, U., Ratnaningsih, C. S., & Ardianstah, R. (2023). *Optimalisasi peran stakeholder dalam meningkatkan daya saing UMKM.* *Jurnal Bisnis dan Manajemen.*
- Nafi'ah, B. A. (2020). *Public sphere review: Peran aktor lokal dalam membranding produk UMKM.* *Journal of Public Administration.*
- Puspita Kharisma Mayang, Fitri Rahma Aulia, I. N. (2024). *Analisis Stakeholder dalam Pengembangan Desa.* 15(1), 24–32.
- Praja, L. D. (2024). *Analisis stakeholder pada pengembangan ekonomi UMKM di KOta Yogyakarta.* *Universitas Islam Indonesia.*
- Rahmatika, D. N., Indriasih, D., Prihatin, Y., & Zuhry, N. (2025). *Akselerasi Literasi Kewirausahaan dan Pendampingan UMKM melalui Inovasi Digital dan Jejaring Kolaboratif di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.* 3(7), 3310–3320.
- Raysharie, P. I., Alexandro, R., & Setyowati, E. D. P. (2025). *UMKM berbasis lahan gambut dan kolaborasi aktor lokal.* *Anterior Jurnal.*
- Setyawan, J., Amelia, H., Cintya, B., Wibowo, J. M., & Iswadi, H. (2023). *PERSEPSI STAKEHOLDER DAN PRODUSEN UMKM TENTANG REBRANDING : STUDI KASUS PENCIPTAAN LOGO “ DOLLY SAIKI POINT .”* 4(1).
- Sudaryanto, A., & Sylvana, A. (2025). *Dinamika Kolaborasi antara Pelaku UMKM Ekonomi Kreatif, Pemerintah , dan Komunitas di Kota Solo.* 1(2), 305–314.
- Tahwi, Muhammad, Nurhidayati, A. (2020). *MODEL PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BERBASIS SINERGITAS MULTI STAKEHOLDERS (Studi Kasus Industri Batik Tulis Lasem Kabupaten Rembang) Muhammad.* 4(2016), 313–326.